

Kejati Surati BPK Minta Bantu Ahli

Kasus Obat Cacing

PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalbar tak mau serampangan memproses kasus dugaan korupsi pengadaan obat cacing di Kabupaten Sanggau tahun 2006-2007 yang merugikan keuangan negara Rp7,177 miliar. Kejati meminta bantuan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar.

"Kita sudah surati BPK untuk meminta bantuan tenaga ahli," kata Arifin Arsyad, kepala Seksi Penanganan dan Hukum Kejati Kalbar, kemarin, di Pontianak.

Dia mengatakan bantuan ahli diperlukan untuk memudahkan proses persidangan kasus obat cacing. Ahli bisa dimintai keterangannya oleh hakim sebagai saksi untuk memberikan keyakinan kepada hakim.

"Surat perhitungan ahli itu kita kirimkan tak lama setelah BPK memberikan hasil audit perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut kepada kita (7 Maret lalu). Sekarang kita terus koordinasi dengan BPK," kata Arifin. Kasus obat cacing mulai ditangani Kejati sejak

• ke halaman 15 kolom 3

Kejati Surati BPK Minta ...

Sambungan dari halaman 9

tahun 2008. Ada dua orang tersangka, yakni FPM, pejabat pembuat komitmen dalam proyek 2006 dan PAT yang menjadi PPK untuk proyek 2007. Perkara untuk kedua orang tersangka dipisahkan.

Bentuk pelaksanaan proyek sendiri, melalui pemberian obat cacing dan multivitamin untuk anak sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, diduga kuat terjadi penggelembungan harga atas jenis obat cacing *embacitrine syrup* dan multivitamin *vicalcine syrup*. Total pengadaan untuk obat cacing adalah 219,030 botol dan vitamin 109,518 botol yang kemudian diberikan kepada sekitar 54 ribu anak Sekolah Dasar dengan dosis masing-masing dua kali pemberian.

Seperti diberitakan (8/3) Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kalbar secara resmi menyerahkan pemeriksaan perhitungan Kerugian

Negara dugaan korupsi kasus obat cacing ke Kejati Kalbar, Senin (7/3) pagi. Pengadaan obat cacing ini merupakan peningkatan ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun Anggaran 2006 dan 2007 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.

Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan kerugian Negara Obat Cacing ke Kejati diserahkan langsung kepala Perwakilan BPK, Adi Sudibyo. Turut mendampingi Kepala Seksi Kalbar II A Tukino dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Sigit Pratama Yudha.

Menurut Sigit, laporan yang diserahkan merupakan kasus atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Obat peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah di Kabupaten Sambas. Dengan tahun anggaran 2006 dan 2007. Adapun nomor laporan hasil pemeriksaan 01/HP/XIX/03/2011 tertanggal 1 Maret. (*stm*)